

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN TOKO EMAS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2284/Pid.B/2022/PN Mdn)

Muhammad Haeykel *
Dr. Danialsyah, S.H.,M.H**
Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H**

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penggelapan, bagaimana pertanggungjawab pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan karyawan toko emas, bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2284/Pid.B/2022/PN Mdn.

Penulisan tesis ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 2284/Pid.B/2022/PN.Mdn. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan hukum tindak pidana penggelapan jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah terhadap terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya.

Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan hukum hakim dalam penerapan sanksi pidana tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan Nomor 2284/Pid.B/2022/PN.Mdn terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Penggelapan.

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I dan II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRACT

RESPONSIBILITY OF PEOPLE OF THE CRIME OF EMBEZZER WHAT GOLD SHOP EMPLOYEES DO (Study of Medan District Court Decision No.2284/Pid.B/2022/PN Mdn)

Muhammad Haeykel *
Dr. Danialsyah, S.H.,M.H**
Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H**

The crime of embezzlement, which is a crime, often occurs in various fields and the perpetrators are even in various levels of society. The formulation of the problem in this thesis is how the legal regulation of the crime of embezzlement is, what is the criminal responsibility for perpetrators of the crime of embezzlement committed by gold shop employees, how is the analysis of the judge's legal considerations in the Medan District Court Decision Number: 2284/Pid.B/2022/PN Mdn.

Writing this thesis uses the library research method to examine secondary data by analyzing the case decision Number 2284/Pid.B/2022/PN.Mdn. The type of data for this research is secondary data. Primary and secondary legal materials are arranged systematically and analyzed qualitatively.

The legal regulation of the crime of embezzlement of office is regulated in Article 374 of the Criminal Code. The occurrence of a criminal act of embezzlement in office is related to assets and objects, there is a criminal act known as embezzlement where abuse of trust dominates as the main element in the occurrence of this criminal act. Criminal liability for the perpetrator of the crime of embezzlement in office is that the defendant is sentenced to prison for 2 (two) years. The actions carried out by the defendant clearly violated the provisions as stipulated in Article 374 of the Criminal Code, the elements of which are.

The conclusion of the discussion is that the judge's legal considerations in applying criminal sanctions for the crime of embezzlement in office in decision Number 2284/Pid.B/2022/PN.Mdn against perpetrators of criminal acts of embezzlement in office can be held accountable for the acts committed with the consideration that at the time of committing the act The defendant was aware of the consequences, the perpetrator in carrying out his actions was in a healthy condition and was capable of considering his actions. The Panel of Judges in the trial did not find anything that could eliminate criminal liability, either justification or excuse reasons.

Keywords: Accountability, Crime, Embezzlement.

**Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.*

***Supervisor I and II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra*